

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan dan mengenakkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya mencapai kesejahteraan. Pembangunan masyarakat Desa selalu dikaitkan dengan masalah kemiskinan, yang dialami oleh sebagian masyarakat dalam kategori Desa, dan lebih khusus lagi masyarakat petani kecil. Dalam perjalanannya pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan regulasi baru terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada ekspetasinya diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang ini akan membawa angin segar perubahan pada masyarakat Desa dan memberikan kesejahteraan pada Desa Zainul Arifin (2018).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradiosional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa) I Wayan Suwendra and Sujana (2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa Samadi, Rahman, and Afrizal (2015). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa tersebut. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha, diharapkan BUMDes nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut Sulaksana and Nuryanti (2019).

Pendirian BUMDES bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat Desa. Pembangunan ekonomi lokal Desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas Desa, dan penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa. Dasar pembentukan BUMDES sebagai lokomotif pembangunan di Desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat Desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, parsipatif, dan emansipatif dari masyarakat Desa Soony, Limpeleh, and Barno Sungkowo (2020).

Seiring perkembangan zaman, Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dalam perekonomian. Dalam perkembangannya yang pesat maka dibutuhkan peran akuntansi sebagai alat untuk menghubungkan

dan mengkonfirmasi transaksi keuangan yang penting. Maka setiap perusahaan atau setiap organisasi harus menyusun laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi (IAI,2016) laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Pihak Internal yang dimaksud terbagi menjadi 3 yaitu Manajemen, Pemegang Saham atau Investor dan karyawan. Sedangkan Pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah Gozali and Kesuma (2017).

Sejalan dengan hal itu, Ikatan Akuntansi (IAI) telah menerbitkan Standar dalam penyusunan laporan keuangan. Standar penyusunan laporan keuangan tersebut berupa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dengan adanya standar ini dapat mempermudah dalam menyusun laporan keuangan Rudini, Nurhayati, and Afriyanto (2016).

BUMDES Safa Marwah berdiri pada Tahun 2016 berdasarkan hasil musyawarah Desa dengan penentuan pengurus BUMDES. Unit usaha pada awal berdirinya BUMDES pada saat itu adalah unit usaha yaitu Simpan Pinjam. Adapun pengurusan awal setelah masa jabatan berakhir maka pengurus BUMDES dilakukan penjaringan pengurus BUMDES baru, melalui mekanisme penjaringan dan musyawarah pada Bulan November 2020 kepengurusan dan kedudukan diganti dengan yang baru.

Dengan modal usaha meneruskan kepengurusan lama dengan penyertaan modal Rp.62.000.000 dengan unit usaha baru yaitu Kebutuhan Bahan Pertanian seperti Pupuk dan peminjaman mesin molen dan sudah tidak meneruskan lagi usaha Simpan Pinjam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan BUMDES dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan dengan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik pada BUMDES Safa Marwah di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo karena dilatarbelakangi dengan belum ada standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan BUMDES yang ada di Desa Luhu Kabupaten Gorontalo. BUMDES Safa Marwah masih menggunakan laporan keuangan sederhana karena kurangnya pengetahuan dan keahlian di bidang penyusunan laporan keuangan yang dimiliki oleh pengurus BUMDES tersebut. Alasan dilakukan penelitian ini karena laporan yang dibuat berupa laporan kas masuk, kas keluar, Neraca dan Laba Rugi. Sehingga diperlukan laporan keuangan BUMDes yang sesuai dengan SAK ETAP yang dimana penerapan SAK ETAP ini akan memberikan keuntungan yakni, mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian laporan yang berhasil tersusun tersebut akan digunakan untuk sejumlah keperluan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal, contohnya dalam memudahkan permohonan pinjaman kepada lembaga lain guna mengembangkan unit usaha BUMDEs Safa Marwah.

Berdasarkan ketentuan dalam SAK ETAP (2016) tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). BUMDES sebagai entitas dapat menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2016).

Seperti yang dikutip oleh Royce Wijaya (2020) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) perlu menerapkan pelaporan keuangan model Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), implementasi standar ini penting supaya perusahaan dibawah naungan BUMDES dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Masih ada berbagai kendala Laporan Keuangan karena pengurus BUMDES tidak berlatar belakang sarjana ekonomi atau akuntansi yang memiliki kemampuan pencatatan Laporan Keuangan. Model SAK ETAP ini perlu diterapkan supaya laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan saat ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat daerah setempat.

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Pramitari et al. (2020) tentang Penerapan SAK ETAP Pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah Pada BUMDES Desa Buduk, hasil penelitian menunjukkan laporan pertanggungjawaban yang disusun belum sesuai dengan SAK ETAP sehingga dirancang suatu model pertanggungjawaban yang sesuai dengan

SAK ETAP guna memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pengguna.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Adilah and Utpala Rani (2020) tentang Kajian Teoritis Pelaporan Keuangan Pada BUMDES Ditinjau Dari SAK ETAP, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SAK ETAP sangat cocok digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BUMDES, karena penyusunan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan BUMDES.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rudini, Nurhayati, and Afriyanto (2016) Tentang Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Langkitin di Desa Langkitin, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan (Jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan penggolongan transaksi pada BUMDES Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDES Langkitin menyajikan Laporan Keuangan hanya dalam dua jenis yaitu neraca dan laporan laba rugi sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas atas laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suriandito, Sinarwati, and Gusti Ayu Purnamawati (2017) tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Kelompok Wanita Tani “SARI TANJUNG” Banjar Dinas Witajati, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleg, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh kelompok wanita tani “Sari Tunjung” masih sederhana dan

secara manual. Kelompok tani ini hanya membuat laporan operasional dan neraca berdasarkan catatan jumlah pinjaman anggota, buku pendapatan dan pengeluaran kas. 2) penyusunan laporan keuangan kelompok wanita tani

“SARI TUNJUNG” yang dilakukan telah sesuai dengan SAK ETAP, Implikasi penerapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan kelompok wanita tani “SARI TUNJUNG” tahun 2016 menyebabkan terjadinya perubahan akun dan nominal pada laporan laba rugi dan neraca. 3) kendala yang dialami oleh kelompok wanita tani “SARI TUNJUNG” dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yaitu tidak mengetahui tentang pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP, faktor kekurangan SDM (sumber daya manusia), dan faktor ketidakpahaman tata cara pelaksanaan pencatatan dan jumlah transaksi yang kecil.

Penelitian oleh Soony et al. (2020) tentang Laporan Keuangan Berdasarkan SAKETAP Pada BUMDES “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan, hasil penelitian tahun buku 2018 menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDES kepada stakeholders, belum menunjukkan laporan keuangan yang komprehensif. Laporan yang dibuat hanya berupa kas harian, menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Hal ini tidak menggambarkan posisi keuangan akhir periode dan tidak memberikan informasi tentang keuntungan entitas pada periode tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih jelas mengenai *“Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Safa Marwah Di Desa Luhu, Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap)”*

## **1.2 Fokus Penelitian**

Agar dapat memberikan penganalisisan yang lebih terfokus maka penulis memberikan batasan masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan BUMDES Safa Marwah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang baik untuk bisa diterapkan di BUMDES Safa Marwah yang tidak pernah dilakukan yaitu tentang laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laba Rugi, Arus kas, Laporan Perubahan Modal dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam bidang usaha dagang periode tahun 2020.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Proses penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Safa Marwah Di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah Bagaimana proses penyusunan Laporan keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Safa Marwah Di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Praktis**

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Di Desa Luhu, Kabupaten Gorontalo tentang Mekanisme SAK-ETAP serta penerapannya dan kondisi lapangan dari BUMDES Safa Marwah Di Desa Luhu Kabupaten Gorontalo .

##### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat memberikan masukan mengenai Ilmu pengetahuan terhadap kajian akuntansi daerah, agar dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian tentang penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada BUMDE, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadikan referensi serta menambah pengetahuan dan wawasan.
- b. Sebagai tambahan data dan informasi untuk studi lanjut mengenai Penerapan SAK ETAP Pada Usaha BUMDES.